

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Memberdayakan masyarakat dirasa menjadi sebuah keharusan yang wajib dijalankan sebuah negara. Apalagi untuk Indonesia yang berazas Pancasila, upaya guna tercapainya intensi dari kemakmuran yang terdapat pada Sila ke Lima dari Pancasila ialah, “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sejalan dengan tujuan dari negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Bagian dari agenda setiap kabinet ialah mengeluarkan berbagai peraturan dan strategi namun masalah dan persoalan ini selalu tidak terselesaikan, dari beberapa situasi ini dijadikan sebagai parameter bahwa masyarakat belum aktif menunjukkan perannya dalam menjadi subjek pada pembangunan nasional.

Pemberdayaan adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Ginanjar Kartasasmita Pemberdayaan atau *empowerment* adalah membentuk masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemandirian dalam konsep pembangunan yakni pada bidang politik dan ekonomi yang memiliki cirinya *participatory, empowering, people centered, and sustainable*. Dapat dikatakan juga pemberdayaan yaitu memupuk secara konstruktif sebuah kapasitas, energi, dan kekuatan serta memandirikan, menstimulasi dan menghidupkan kembali daya sadar dari kapabilitas dan kompetensi yang ada sehingga dapat dikembangkan nantinya. Dapat dilihat pada *terminology* pembangunan, terdapat arti memampukan, melibatkan serta dapat bertanggung jawab kepada masyarakat untuk pengelolaan kesejahteraan. Pada diri manusia pada hakekatnya terdapat pemberdayaan akan tetapi adanya faktor eksternal atau faktor luar yang berperan menjadi perangsang timbulnya antusiasme, serta perasaan yang mendorong untuk memberdayakan diri pada potensi yang dimilikinya. Segala usaha guna membuat peningkatan pada derajat, taraf, dan harga diri setiap golongan maupun tingkatan berbagai kelompok dan golongan masyarakat yang pada waktu ini masih bergelut atau berjuang dengan kemiskinan dan keterbelakangan yang tujuan akhirnya adalah membentuk kemampuan dan

kemandirian dari masing-masing individu dapat dikatakan memberdayakan masyarakat.

Empat fungsi pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya merupakan fungsi pemerintah yang antara lain, yaitu pembangunan (*development*) pelayanan (*public service*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Fungsi dari pemerintah tersebutlah dapat berjalan ketika waktu yang telah ditentukan kualitas menggambarkan dari pemerintah. Bila selanjutnya dalam fungsinya pemerintah menjalankannya dengan baik, sehingga tugas pokok akan terlaksana sebaik mungkin yakni pelayanan mampu menciptakan keadilan, pemberdayaan mampu menciptakan kemandirian, serta pembangunan yang mampu menciptakan kemakmuran.

Proses dari sebuah langkah memberdayakan masyarakat biasanya dapat terbentuk serta terbangun kesejahteraan juga rasa mandiri atau independensi dari masyarakat dalam mengarungi perkembangan di dalam globalisasi akan cepat. Dalam meningkatkan daya cipta dari masing-masing individu dalam sebuah kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan merujuk pada perekonomian yang didasari dari keseriusan pemerintah mengembangkan Sumber Daya Manusianya. Untuk dapat meningkatkan kualitas dari masyarakat dengan program yang ada pada pemberdayaan sangatlah diperlukan. Disebutkan oleh Ndraha pemerintah mempunyai fungsi dasar, yakni fungsi primer atau pelayanan dan fungsi sekunder atau pemberdayaan. Berbagai hal yang dilakukan secara berkesinambungan serta berkolerasi secara positif memberdayakan individu yang berada dibawah pemerintahannya dapat dikatakan fungsi primer. Dengan arti lainnya ketika masyarakat semakin berdaya, maka fungsi primer pemerintah semakin meningkat. Berbeda dengan fungsi primer, pada fungsi sekunder berkesinambungan pada tingkat keberdayaan yang diperintah. Dengan arti lainnya ketika masyarakat semakin berdaya, maka fungsi sekunder pemerintah dari *rowing* (pengaturan) ke *steering* (pengendalian) semakin berkurang. Pemberdayaan atau fungsi sekunder berangsur-angsur mampu diberikan pada masyarakat dalam mencukupi kebutuhan masing-masing. Kewajiban pemerintah ialah melakukan berbagai upaya melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menimbulkan peningkatan keberdayaan agar masing-masing individu

memiliki kemandirian untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri tanpa adanya keterlibatan dari pihak lainnya termasuk pemerintah. Maka masyarakat yang mandiri serta pembangunan adalah usaha dari pemberdayaan untuk terciptanya kesejahteraan sosial. Sejalan dengan perihal tersebut, hasil dari pembangunan juga hal-hal yang dilakukan untuk memberdayakan individu yang berada dibawah pemerintahannya dengan batasan yang ada ialah memupuk secara berangsur-angsur dan sistematis agar memiliki kemandirian guna memenuhi kebutuhan dari masing-masing individu tersebut.

Terjaganya dan diisinya pembangunan dari kemerdekaan yang berkeadilan dan demokratis serta dilakukan secara berangsur-angsur namun terus menerus. Sesuai pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Berdasarkan UU tersebut yang dimaksudkan ialah mampu membuka peluang untuk menyamaratakan pembangunan untuk daerah tertinggal. Pemerataan yang dimaksud sebelumnya juga adanya progres atau peningkatan pada tingkat perekonomian dapat membentuk kesejahteraan diantara masyarakatnya. Tingkatan pada pertumbuhan meskipun bernilai tinggi tetapi jika tidak diikuti dengan pemerataan pada pembangunan hanya akan menjadikan ekonomi daerah tersebut cenderung rapuh dan hal tersebut merupakan eksploitasi pada Sumber Daya Manusia. Pernyataan itupun sejalan dengan Hipotesis Kusnets yang mengemukakan bahwa ketidakmerataan (*inequality*) dapat memberikan peningkatan namun pada waktu tertentu juga terjadi penurunan dikarenakan terdapat efek ke bawah (*trickle down effect*), jadi kurva akan membentuk huruf U terbalik (*Inverted U*). Namun fakta yang ada dilapangan, efek ke bawah (*trickle down effect*) tidak melulu terjadi, yang mengakibatkan pembangunan yang merata juga tidak terjadi. Maka dapat dikatakan menurut hipotesis belum adanya usaha yang mampu mencapai keberhasilan atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah guna menciptakan pembangunan yang merata sehingga tidak terjadi efek ke bawah (*trickle down effect*). Sehingga diperlukan adanya penyulut dari pemerintah untuk dapat terwujudnya pemerataan pembangunan selain itu diperlukan sumber daya manusia berkapabilitas atau berpotensi guna melakukan pembangunan bagi dirinya sendiri bahkan untuk tujuan yang lebih jauh bagi lingkungan sekitar. Artinya, masyarakat diharuskan berkemampuan atau memiliki daya kemudian pemerintah diharuskan

menyediakan fasilitas pendukung guna menyokong kemampuan dan daya masyarakat tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2015 Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung mengeluarkan sebuah program baru guna meningkatkan pembangunan kota Bandung yakni Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) hal tersebut merupakan bentuk usaha pemerintah dalam mengimplementasikan fungsinya. Program yang akan dilakukan berdasarkan pada peningkatan tugas beserta fungsi dan peranan dari aparatur kewilayahan juga masing-masing individu yang berpartisipasi dalam kelurahan untuk melakukan berbagai upaya menciptakan percepatan pembangunan dengan pembangunan itu sendiri, melalui pengembangan, dan memberdaya-gunakan masyarakat. Kegiatan dari PIPPK termasuk pada inti dari pengembangan dikewilayahan untuk bagian desentralisasi kewilayahan di Kecamatan. Wilayah Kecamatan mempunyai tiga peran utama, yakni menjadi model program sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien guna senantiasa mengedepankan kesejahteraan masyarakat, menjadi faktor yang mengembangkan kehidupan perekonomian kerakyatan dan menjadi faktor yang mengembangkan demokrasi di tingkat Kota yang menjadi salah satu arena politik yang dapat memberikan jembatan bagi politik setingkat kelurahan dengan kota yang menjadi kunci dalam mengambil keputusan-keputusan politiknya.

Pada peraturannya Walikota Bandung No 281/2015 menyebutkan, maksud serta tujuan dilaksanakan PIPPK, yakni dapat memberikan peningkatan pada tugas, peran, beserta fungsi aparat kewilayahan juga seluruh stakeholder lembaga kemasyarakatan kelurahan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan dan pemberdaaan masyarakat. Didalam Pelaksanaan PIPPK sangat diharapkan untuk menimbulkan sinergi kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan untuk melaksanakan PIPPK yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Output dari PIPPK di tahun awal berfokus pada infrastruktur dan kebersihan. Pada tahun kedua memaksimalkan pemberdayaan ekonomi. Pada Buku Sosialisasi PIPPK Kota Bandung 2015 dipertegas, program tersebut merujuk pada semangat desentralisasi, inovasi, dan kolaborasi. Berbagai macam program dari pembangunan yang akan diamanatkan untuk

setiap kelurahan berdasarkan pada kebutuhan dari masing-masing kelurahan, dan atas dasar kerja sama antara Pemkot Bandung dengan seluruh masyarakat di Kota Bandung.

PIPPK atau kepanjangannya ialah Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan menyatakan perubahan yang dinamis akan timbul secara maksimal pada masing-masing individu jika individu tersebut berpartisipasi secara aktif dari seluruh golongan masyarakat baik dari tingkatan masyarakat terbawah sampai teratas guna keputusan yang diambil mampu menyelesaikan masalah-masalah melalui metode Pemberdayaan Masyarakat hal tersebut adalah pandangan juga pemikiran awal teretusnya PIPPK.

Basisnya pada partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaannya PIPPK menghasilkan hasil akhir yang mengarah guna dapat mengupayakan berbagai hal yang meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk merealisasikan Visi Kota Bandung yakni “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, sehingga agar terealisasinya RPJMD, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan PIPPK yang akan dijalankan oleh SKPD Kecamatan se-Kota Bandung merupakan proses dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran aktif dan juga partisipasi dari masyarakat mampu dimaksimalkan dengan dasar dari tujuan pembangunan serta memberikan arah bagi pembangunan sehingga mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan juga sebagai patokan dari fokus sebuah keberhasilan pembangunan, yang dapat dikatakan bahwa masyarakat sebagai subjeknya. Kerjasama, koordinasi, dan sinergitas mampu terjalin diantara masyarakat dengan pemerintah secara optimal, hal tersebut dilihat dari tingkat keaktifan masyarakat dalam proses pembangunan, dikarenakan keaktifan dari masyarakat sangat menentukan berhasil tidaknya proses pembangunan yang dimaksud tersebut.

Program PIPPK dijalankan sejak bulan Maret tahun 2015. Maka dapat dikatakan PIPPK ini telah direalisasikan dalam kurun waktu empat tahun. Dalam sebuah website resmi humas kota Bandung ditemukan berita tentang gelar pemberdayaan masyarakat Kota Bandung. Wali Kota Bandung Oded M. Danial

menyerahkan sebuah penghargaan pada kewilayahan yang menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan sejumlah kegiatan, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Award dengan kategori Realisasi dicapai oleh Kecamatan Sukajadi, kategori Partisipasi dicapai oleh Kecamatan Bandung Kulon, kategori Kolaborasi dicapai oleh Kecamatan Babakan Ciparay dan kategori Inovasi dicapai oleh Kecamatan Lengkong. Penghargaan atas kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR) tingkat Lurah, dianugerahkan untuk lurah dan LPM Babakan Ciparay, lurah dan LPM Braga, dan lurah dan LPM Sukamiskin penghargaan tersebut diberikan untuk kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR) tersebut. Dari diberikannya penghargaan atas realisasi program PIPPK menjadi bukti Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Babakan Ciparay dan Kecamatan Lengkong sudah menjalankan program PIPPK secara optimal. Oleh sebab itu, berdasarkan berita yang telah ditemukan, penulis ingin mengetahui pelaksanaan PIPPK pada tahun 2015-2019 yang dilaksanakan oleh Kecamatan yang tidak mendapatkan penghargaan yang artinya kecamatan tersebut masih belum dengan maksimal melaksanakan program PIPPK di wilayahnya.

Berdasarkan dari uraian yang ada di latar belakang yang sudah dijabarkan pada bagian sebelumnya mampu dijadikan acuan dasar guna melakukan penelitian yang lebih lanjut berdasarkan latar belakang tersebut sehingga memberikan pengaruh atas keberhasilan dari berpartisipasi masyarakat dalam implementasi program yang ada dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Sarijadi. Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian yang berjudul: **“Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan studi Kasus di Kelurahan Sarijadi”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana partisipasi pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dilihat dari faktor pemberdayaan masyarakat dan komunikasi?

2. Bagaimana peran Kelurahan Sarijadi beserta Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam membangun partisipasi masyarakat dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)?
3. Bagaimana program pemberdayaan sosial apa yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan Kelurahan Sarijadi dalam mendukung Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayaha (PIPPK)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui seperti apa partisipasi masyarakat pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dilihat pada faktor pemberdayaan dan komunikasi yang ada di wilayah Kelurahan Sarijadi.
2. Dapat mengetahui bagaimana peran pemimpin dan juga Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam melaksanakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).
3. Dapat mengetahui program social seperti apa yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan Kelurahan dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian yang dilakukan memberikan andil untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara khusus yang berhubungan dengan kebijakan dan pembangunan. Penulis juga mengharapkan penelitian yang dilakukan mampu dijadikan sebagai referensi untuk intropeksi bagi Kecamatan Sukasari khususnya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kelurahan Sarijadi dikarenakan penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang memberikan pengaruh atas ketidakberhasilan dari implementasi PIPPK di Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kelurahan Sarijadi serta dapat menjadi anteseden atau *role model* dalam pelaksanaan PIPPK di tahun mendatang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi peneliti, segala hal dan proses yang telah dilakukan mampu memperluas pengetahuan dan anggapan pemikiran juga keilmuan dari peneliti sendiri serta menambah pengalaman peneliti karena merealisasikan apa yang telah didapat selama belajar dalam proses perkuliahan.
- 2) Bagi lembaga (Universitas), penelitian yang telah dilakukan mampu menjadi referensi tambahan bagi pihak lain terutama mahasiswa lainnya yang tertarik mengambil sebuah penelitian mengenai partisipasi masyarakat dan implementasi kebijakan dan/atau pembangunan.
- 3) Bagi instansi (kecamatan dan kelurahan), penelitian yang telah dilakukan mampu menambah opsi dalam pengambilan keputusan atas pengevaluasian dari terlaksananya program-program yang telah dikeluarkan secara khusus daa penelitian ini ialah PIPPK serta program lainnya yang akan dilakukan dikemudian hari.

1.4.3 Struktur Organisasi Skripsi

Secara khusus, bagian ini berisi penataan atau pengaturan penulisan dalam skripsi yang dilakukan oleh penulis guna menggambarkan isi dari setiap bab, kronologi penulisan, dan hubungan atau kolerasi yang tercipta antar bab yang ada sehingga terbentuk gambaran komplet dari sebuah skripsi. (*Karya Tulis Ilmiah, 2018*)

1. **BAB I PENDAHULUAN**, di bab I ini peneliti akan menguraikan mengapa peneliti mengambil judul penelitian yang dikaitkan dengan latar belakang, perumusan masalah penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian serta struktur organisasi skripsi
2. **BAB II KAJIAN PUSTAKA**, pada bab ini peneliti akan memuat eksplanasi kajian pustaka skripsi yang memberikan konteks jelas dari masalah-masalah yang difokuskan untuk dijawab oleh peneliti. Kajian pustaka menunjukkan *the state of the art* dari teori yang digali atau dicari dan kontruksi permasalahan yang diangkat pada penelitian dalam disiplin keilmuan tertentu. Secara spesifik, pada bab ini peneliti melakukan perbandingan, melakukan pemisahan atau membuat kontras, dan menempatkan setiap aspek yang diteliti dengan

mengaitkannya kepada permasalahan yang diangkat sebelumnya. Pada bab ini juga peneliti memberikan penjelasan mengenai kedudukan atau pandangannya dengan argumentasi yang masuk akal dan analitis. Bab ini juga bertujuan guna menggambarkan “mengapa dan bagaimana” peneliti menerapkan dan mengembangkan teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli bahkan penelitian-penelitian yang sejenis yang telah dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian ini, contohnya dalam menentukan perkiraan atau premis dalam penelitian.

3. **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, lalu pada bab ini peneliti akan memuat langkah-langkah prosedural, karena bagian ini bertujuan untuk memberikan pengarahannya atas rancangan aliran atau plot dari penelitian yang dilakukan meliputi metode-metode yang dilakukan oleh peneliti, alat atau perangkat yang dapat dipakai peneliti, langkah-langkah untuk mampu mengumpulkan data, sampai pada proses penganalisisan data yang dilaksanakan oleh peneliti.
4. **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**, selanjutnya pada bab ini peneliti akan memuat dua hal utama, yaitu (1) hasil yang ditemukan selama penelitian berlangsung merujuk pada hasil dari adanya proses mengolah dan menganalisis data dalam beragam bentuk yang sejalan dengan susunan masalah yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya, dan (2) pembahasan atas hasil yang ditemukan tersebut. Cara *nontematik* ialah suatu sistem yang memisahkan antara penjabaran hasil penelitian dan pembahasannya. Sebaliknya, cara *tematik* ialah sistem yang menggabungkan penjabaran hasil penelitian dan pembahasannya.
5. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**, terakhir pada bab ini peneliti akan memuat berbagai kesimpulan, keterkaitan atau asosiasi yang timbul, dan anjuran atau saran yang memaparkan asumsi-asumsi atau perkiraan dan pandangan atau pemahaman peneliti terhadap hasil dari penganalisisan data serta memberikan temuan esensial yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan penelitian ini. Secara garis besar, terdapat dua preferensi untuk menulis kesimpulan, antara lain dengan poin per poin dan juga dengan satu eksplanasi atau ulasan penuh.